**BAB I
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Kemajuan teknologi dan komunikasi di dunia saat ini mulai berorientasi pada peningkatan hubungan dalam kontak antara aktor maupun non aktor dari berbagai bangsa dan budaya. Karena perkembangan dalam teknologi dan komunikasi telah memperluas batasan setiap kegiatan manusia perkembangan tersebut berdampak pada arus globalisasi saat ini menjadi semakin pesat dan meluas. Jarak dan batasan wilayah bukanlah sebuah hambatan untuk berinteraksi dalam melakukan sebuah hubungan antara aktor-aktor maupun non aktor di zaman era modernisasi, mengikuti perkembangan dunia dewasa ini, membuat isu isu dalam Hubungan Internasional juga menjadi sangat luas.

 Studi Ilmu Hubungan Internasional yang pada awalnya berfokus pasa isu-isu *high politics* seperti perang dan ekonomi, dewasa ini studi Ilmu Hubungan Internasional berkembang menjadi Ilmu yang dinamis diliputi oleh isu-isu *low politics*, seperti *social* dan *culture.* Bermula dari realitas yang berkembang saat ini studi Ilmu Hubungan Internasional menjadi bidang studi yang dinamis dengan berbagai disiplin ilmu lainnya karena tidak berfokus pada satu isu saja. Perubahan isu global juga membuat dunia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan. Dan untuk menghindari menjadi kelompok yang dirugikan, sebagai mahasiswa Hubungan Internasional harus memahami bahwa HI adalah bidang studi yang interdisipliner.[[1]](#footnote-2)

 Studi Ilmu Hubungan Internasional sebagai bidang studi yang interdisipliner menjadikan ilmu HI tersebut ramah terhadap segala bidang ilmu lainnya karena studi Ilmu Hubungan Internasional tidak lagi statis pada satu level saja, pasti akan selalu menemukan perubahan, pergeseran dan terus berkembang. Bidang Ilmu yang berkembang menjadi ranah HI Diantaranya bidang ilmu politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, studi Ilmu Hubungan Internasional akan terus berkembang cakupannya seiring berkembangnya zaman. Sebagai salah satu contohnya adalah bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi mencakup beberapa subsektor salah satu diantaranya adalah sektor industri pariwisata.

 Maka dari itu pariwisata menjadi salah satu isu yang dinamis dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Hubungan Internasional sebagai hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.[[2]](#footnote-3)Salah satu instrumen sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya yaitu dengan cara melakukan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasionalakan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negrinya sendiri.

 Salah satu contoh dalam kerjasama internasional adalah keikut sertaannya sebuah negara dalam sebuah organisasi internasional. Menurut Evans dan Nenham (1998) : organisasi internasional adalah suatu instusi formal yang dibentuk dari adanya perjanjian antara aktor-aktor dalam hubungan internasional.[[3]](#footnote-4) Pada dasarnya, setiap negara yang membangun dan mengembangkan kepariwisataan memerlukan suatu organisasi atau wadah yang dapat berfungsi membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional maupun internasional dalam bentuk organisasi pemerintah, semi pemerintah atau bukan pemerintah. Di dalam organisasi yang bersifat internasional, diharapkan adanya kerjasama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing negara terutama dalam bidang kepariwisataan. Untuk itu, setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan yang bersifat internasional, regional maupun nasional.[[4]](#footnote-5)Salah satu organisasi kerpariwisataan internasional diantaranya *Word Tourism Organization* (WTO), organisasi pariwisata dunia yang bermarkas di spanyol ini selain berfungsi sebagai konsultan PBB, tugas WTO yaitu mempromosikan wisata di seluruh dunia, khususnya pada negara-negara yang sedang tahap pembangunan, WTO mengumpulkan informasi dan bahan-bahan yang dipublikasikan yang berhubungan dengan pola pariwisata dunia mutakhir, melakukan pendekatan pemasaran,dan juga pada kegiatan-kegiatan melindungi budaya dan sumber alam yang ada dan badan ini juga menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan, selain itu WTO juga berusaha memudahkan perjalanan internasional dengan berbagaicara diantaranya mengurangi jumlah paspor dan visa yang dibutuhkan oleh negara-negara tertentu.

 Selain WTO ada beberapa organisasi pariwisata diantaranya organisasi pariwisata regional yaitu *Asean Tourism Assosiation* (ASEANTA), ASEANTA dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam mempromosikan pariwisata antara Negara ASEAN selain itu ada *Asian Association of Convention and Visitor’s Bureaus* (AACVB) suatu organisasi kepariwisataan yang bergerak di bidang pengembangan dan pembinaan usaha konvensi di Kawasan Asia. Serta organisasi sub regional yaitu Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) dan yang terakhir organisasi kepariwisataan nasional yaitu (NTO), tujuan utama NTO adalah tujuan ekonomi, mereka ingin meningkatkan pendapatan ekspor sebuah Negara dengan menarik kedatangan lebih banyak wisatawan. Dengan cara ini diharapkan bahwa perekonomian akan berkembang, meningkatkan jumlah lapangan kerja, pendapatan dan pajak sambil meningkatkan perimbangan pertumbuhan ekonomi secara regional.[[5]](#footnote-6)

 Kepariwisataan merupakan salah satu subsektor andalan pembangunan nasional khususnya di negara Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan perolehan devisa, kesempatan usaha dan kesempatan kerja.[[6]](#footnote-7) Tidak dapat dipungkiri lagi sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertumbuhan ekonomi ditengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara. Berbicara mengenai Industri Pariwisata sama halnya berbicara soal Globalisasi yang merupakan salah satu isu Hubungan Internasional. Karena pada dasarnya pariwisata tidak mengenal tingkat batas wilayah.

Sektor pariwisata memang cukup menjanjikan untuk turut membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Situasi nasional yang kini mulai memperlihatkan perkembangan ke arah kestabilan, khususnya dalam bidang politik dan keamanan akan memberikanjaminan kepercayaan kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat.

Situasi dan kondisi sebuah negara sangat berperngaruh pada perkembangan sektor industri pariwisata, diantaranya persoalan keamanan sebuah negara, situasi politik dalam negri, bencana alam, kesehatan, birokrasi imigrasi dan persoalan lainnya, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing yang datang ke sebuah negara. Untuk dapat memperoleh kembali devisa negara dari sektor pariwisata serta meningkatkan daya saing wisata, maka negara tersebut harus mampu menggairahkan kembali industri pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan.[[7]](#footnote-8)

 Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang pemerintah Indonesia adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia. Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditunjukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Seperti negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan ini bersifat respirokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa.[[8]](#footnote-9) Seseorang yang berminat untuk berkunjung ke negara lain membutuhkan dua dukumen penting, yaitu Paspor dan Visa. Visa merupakan catatan dalam paspor atau *travel document* lainnya yang diberikan oleh konsul atau pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa pemegang paspor yang bersangkutan telah diberikan jaminan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki atau masuk kembali ke negara yang bersangkutan.[[9]](#footnote-10)

 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), yaitu memberikan bebas visa untuk kunjungan wisata selama 60 hari dan tidak dapat diperpanjang, Kebijakan ini sudah diberlakukan sejak tahun 1983 kepada warga negara asing dan mengalami beberapa perkembangan diantaranya mengalami penambahan dan pengurangan terhadap daftar negara penerima fasilitas bebas visa. Pada era Megawati, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa.Kebijakan ini dibentuk didalam Keppres No. 18 Tahun 2003. Kemudian pada tahun 2008 diera Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, tercatat 12 negara yang mendapatkan bebas visa, dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan mengahapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya.

 Pada tahun 2011, masih dibawah pimpinan Presiden SBY, ditambahkan tiga negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.Kedua kebijakan SBY ini tercantum didalam Perpres No. 16 tahun 2008 dan Perpres No. 23 tahun 2011.Dan sekarang dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tercatat ada 169 negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Tahap pertama dengan 30 negara yang mendapatkan fasilitas BVKS, tercatat dalam Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara.Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi169negara.[[10]](#footnote-11) Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, sebagian besarnya negara-negara yang berada dikawasan Asia.

 Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pariwisata dijadikan sebagai sektor prioritas dalam lima tahun kedepan. Dan dengan dicetusnya kebijakan bebas visa ini diproyeksikan dapat mendorong banyak wisatawan mancanegara yang menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah dan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama cenderung tumbuh linear dan tertinggal dari banyak negara, khususnya dikawasan Asia Tenggara. Dan kebijakan bebas visa ini harus diikuti dengan langkah-langkah yang bersifat proaktif dan inovatif untuk dapat meningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia khususnya di Jawa Barat.

 Selalu ada prokontra pada sebuah kebijakan yang di buat pemerintah, hal ini terjadi pada kebijakan bebas visa diantaranya yaitu pengajuan evaluasi dari beberapa kalangan diantaranya DPR RI Komisi Satu Kebijakan BVKS ini dinilai banyak merugikan di banding keuntungannya maka dari itu di bentuklah sebuah Panja Bebas Visa yang tujuannya untuk mengkaji terkait kebijakan dari perpres ini.[[11]](#footnote-12) Selanjutnya Wagub Jabar mendorong evaluasi kebijakan bebas visa ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang melihat dampak membahayakan dengan aturan bebas visa tersebut. "Bebas visa selain ada peluang ekonomi, juga ada ancaman. Ini perlu diwaspadai lebih jauh," dengan bebas visa peluang kejahatan lintas negara bisa terbuka lebar. Mulai dari terorisme, narkoba, hingga tenaga kerja ilegal yang belakangan menjadi isu hangat di Tanah Air karena banyak ditemukan di beberapa wilayah. Apalagi ia menilai potensi TKA ilegal di Jabar juga tergolong besar.[[12]](#footnote-13) Dari hal ini lah penulis berangkat untuk menjadi bahan penelitian.

 Industri pariwisata juga memiliki karakter unik, bahwa sektor pariwisata memberikan efek berantai (*multiplier effect*) terhadap distribusi pendapatan penduduk di kawasan sekitar pariwisata, elastis terhadap krisis nasional yang terjadi dalam arti tidak terlalu terpengaruh oleh krisis keuangan dalam negeri, ramah lingkungan serta kenyataan bahwa industri pariwisata merupakan industri yang *nir* konflik.[[13]](#footnote-14)

Oleh karena itu berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dalam skripsinya penulis mencoba mengangkat judul **“ Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia dan dampaknya terhadap kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarakan pada uraian masalah yang ada, penulis menguraikan kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Apa tujuan dibuatnya kebijakan bebas visa kunjungan singkat indonesia?
2. Bagaimana perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan era Kepemimpinan Joko Widodo?
3. Bagaimana dampak kebijakan bebas visa kunjungan singkat Indonesia ke Jawa Barat?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu pada kebijakan bebas visa kunjungan singkat Indonesia dan dampaknya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Baratdalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2016.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dan dengan memperhatikan rumusan penelitian pembatasan masalah, maka hal yang menjadi kajian penulis yaitu **“Bagaimana dampak kebijakan bebas visa kunjungan singkat terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat”**.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan dibentuknya kebijakan bebas visa kunjungan singkat Jawa Barat.
2. Untukmenjelaskan dan menganalisis bagaimana perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan era Kepemimpinan Joko Widodo.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan bebas visa kunjungan singkat terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat.
4. **Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penlitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan pariwisata Indonesia khususnya di Jawa Barat.
2. Untuk menambah wawasan penulis mengenai Kebijakan Bebas Visa dan dampaknya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat.
3. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait mengenai peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dalam sektor pariwisata.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Teori merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika dan menjadi satubentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Sebuah teori menampilkan sebuah sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi preposisi-preposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan diantara beberapa variabel agar bisa memaparkan penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.

Dari dua defenisi tersebut, maka untuk menjelaskan pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia, penulis menggunakan teori-teori dan konsep-konsep pemikiran sebagai berikut.[[14]](#footnote-15)

Pasca perang dingin isu-isu hubungan internasional tidak lagi hanya fokus pada aspek-aspek *high politics* saja, tetapi juga mulai fokus pada aspek *low politics*. Isu-isu hubungan internasional meluas dan mulai menganggap bahwa isu-isu seperti ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan terorisme mulai penting untuk dibicarakan.Hal ini dipengaruhi oleh salah satu isu hubungan internasional yang mulai berkembang selama beberapa dekade terakhir yaitu globalisasi.

Dengan adanya globalisasi ini mampu menimbulkan interdepedensi diantara negara-negara dalam berbagi bidang yang menjadikan adanya kerjasama bagi setiap aktor dalam hubungan internasional sehingga kerjasama dapat dilakukan baik secara bilateral dan multilateral.Dengan adanya pengaruh dan peran besar dari globalisasi yang juga menjadikan batas-batas antara negara menjadi semakin semu, sehingga aktifitas suatu negara dapat mempengaruhi masyarakat dinegara lainnya.

Setiap manusia tidak dapat hidup terpisah dengan sesamanya karena keterbatasan dan kekurangan-kekurangannya. Oleh sebab itu sebuah interaksi menjadi bagian penting bagi kehidupannya dalam rangka mewujudkan keinginan dan kepentingan-kepentingannya. Demikian halnya dengan negara yang tidak dapat menolak keberadaan pihak lain dalam memenuhi kepuasan, kepentingan atau kebutuhannya. Adapun definisi dari Hubungan Internasional itu sendiri dijelaskan oleh K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda, menggambarkan Hubungan Internasional sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian politik luar negeri atau politik internasional meliputi segala kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”.**[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan definisi di atas, kita dapat melihat bahwa ruang lingkup hubungan internasional tersebut mencakup segala bentuk interaksi baik antara *state* maupun *non state* yang sifatnya melintasi batas negara. Pola interaksi dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh *state actors* maupun *non state actors*. Interaksi ini dapat berupa Kerjasama *(Cooperation*), Persaingan *(Competition),* dan Pertentangan *(Conflict)* yang tentu saja sifatnya melintasi batas Negara selanjutnyastudi Ilmu Hubungan Internasional sebagai bidang studi yang interdisipliner menjadikan ilmu HI tersebut ramah terhadap segala bidang ilmu lainnya karena studi Ilmu Hubungan Internasional tidak lagi statis pada satu level saja, pasti akan selalu menemukan perubahan, pergeseran dan terus berkembang pengkajian hubungan internasional termasuk di dalamnya pengkajian politik luar negeri atau politik internasional meliputi segala kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional. Sebagai salah satu contohnya adalah bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi mencakup beberapa subsektor salah satu diantaranya adalah industri pariwisata.

Mulai dari Jhon Locke di abad ke-17, melihat potensi yang besar bagi kemajuan manusia di dalam *civil society* dan perekonomian kapitalis modern.Kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia.Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional.

Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu sama lain. Tetapi kaum ini juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik itu domestik maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik didalam negeri maupun diluar negeri.[[16]](#footnote-17)Setelah Perang Dunia Kedua, paradigma liberalis dibagi menjadi empat bagian, yaitu liberalis sosiologis, liberalis republikan,liberalis intutisional dan liberalis interdepedensi.[[17]](#footnote-18)

Liberalis interdepedensi menyatakan bahwa tingkat tertingi dalam hubungan internasional antara negara berarti juga tingkat tertinggi dalam interdepedensi.[[18]](#footnote-19)Dan dengan adanya interkasi-interaksi yang menimbulkan kerjasama maka akan tercipta suatu ketergantungan atau dengan kata lain munculnya interdepedensi yang menyebabkan suatu negara dengan negara lainnya akan saling bekerjasama untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Dalam melakukan interaksi dengan negara lain khususnya negara-negara yang menjadi pesaing wisata Indonesia di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, maka Indonesia akan berusaha mencapai kepentingan nasionalnya atau dengan kata lain menjalankan politik luar negerinya.Indonesia mencanangkan berbagai bentuk kebijakan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawanmancanegara yang mampu meningkatkan perekonomian negara yang tersusun dalam politik luar negerinya.

Kepentingan Nasional adalah perihal yang vital dan dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan luar negeri diambil dan dilakukan sekaligus dapat diungkapkan obyektifitas apa yang menjadi pilihan realitas dari suatu kebijakan politik luar negeri dilakukan.[[19]](#footnote-20)Dan negara merupakan aktor utama dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Menurut **Jack C Plano dan Roy Olton**, Kepentingan Nasional:

**“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs”[[20]](#footnote-21)**

Dari definisi kepentingan nasional diatas, menjelaskan bahwa dengan menambahkan fasilitas kebijakan bebas visa kunjungan singkat ke negara yang memiliki potensi wisatawan tinggi merupakan sebuah usaha pemerintah dalam mencapai tujuan suatu bangsa melalui kepemimpinan dengan produk sebuah kebijakan yaitu kebijakan bebas visa, untuk memenuhi kebutuhan negara dalam sektor ekonomi melalui industri pariwisata sebagai sumber devisa negara.

Untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut, Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.Selain itu, pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan negera untuk mendorong perekonomian negara yang juga menjadi salah satu kepentingan nasional bagi Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penghasil devisa Negara.

Pariwisata menurut **Norval**, mengemukakan:

**“Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal,dan pergerakan penduduk asing di dalam atau diluar suatu negara, kota atau wilayah tertentu**.**”[[21]](#footnote-22)**

Sedangkan menurut **Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan Bab 1 pasal 1** dinyatakan bahwa:

**“Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secra sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.”[[22]](#footnote-23)**

**Kepariwisataan Internasional** (**International Tourism), adalah kombinasi antara dua bentuk dasar *inbond* dan *outbond*tourism, yang meliputi kunjungan pendatang (non-resident) ke dalam suatu negara yang bukan tempat tinggalnya (wisman) dan kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh penduduk suatu negara. Bentuk kepariwisataan ini melibatkan kegiatan ekonomi antar negara (import-export) sebagai akibat dari kegiatan konsumsi para wisatawan dari berbagai negara yang saling berkunjung tersebut**[[23]](#footnote-24)

Pada dasarnya terdapat tiga bentuk kepariwisataan, yaitu: Home Tourism, adalah kunjungan penduduk suatu negara yang dilakukan dalam negaranya sendiri. Inbound Tourism, yaitu kunjungan yang dilakukan penduduk suatu negara ke negara lain yang bukan tempat tinggalnya.Outbound Tourism, kunjungan yang dilakukan penduduk suatu negara ke negara lainnya.[[24]](#footnote-25)

Dan untuk meningkatkan nilai pariwisata Indonesia, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat beberapa program utama dan kegiatan pokok. Salah satunya sebagai berikut:

**“Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan pokok: pengembangan pasar dan informasi pariwisata; peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri; peningkatan pencitraan indonesia; dan peningkatan promosi konvensi, insentif, even dan minat khusus.”**[[25]](#footnote-26)

Tourism Marketing menurut **Oka A. Yoeti**:

**Pemasaran Pariwisata (*TourismMarketing*) adalah suatu sistim dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan internasional untuk dapatmencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.[[26]](#footnote-27)**

 Dalam meningkatkan pengembangan pariwisata sebagai sektor utama pemerintah Indonesia mempunyai tujuan ekonomi, mereka ingin meningkatkan pendapatan ekspor sebuah negara dengan menarik kedatangan lebih banyak wisatawan. Pemerintah Indonesia melaluiKementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat beberapa program salah satunya berbentuk sebuah kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata, kebijakan yang di buat oleh pemerintah Indonesia yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat, Kebijakan Bebas Kunjungan Singkat Indonesia merupakan strategi pemasaran pariwisata (*Tourism Marketing*) dengan tujuan ekonomi, pendapatan ekspor sebuah negara dan pendapatan devisa negara dengan menarik kedatangan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia.

 Politics in tourism menurut **James Elliott**:

***“Politics is about the striving for power, and power is about who gets what, when and how in the political and administrative system and in the tourism sector. Principles and control systems are there to try and ensure that power is used in the public interest and that proper and legitimate procedures and objectives are followed. PSM in particular must manage within the political environment, taking into account the political ideology, power conflicts and the priorities of governments and ministers as well as policy objectives.”[[27]](#footnote-28)***

Politik adalah tentang berjuang untuk kekuasaan, dan kekuasaan adalah tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana dalam sistem politik dan administratif dan di sektor pariwisata. Prinsip dan sistem kontrol yang ada untuk mencoba dan memastikan daya yang digunakan untuk kepentingan umum dan prosedur yang tepat dan sah dan tujuan diikuti. PSM (*public sector management*) khususnya harus mengelola dalam lingkungan politik, dengan mempertimbangkan ideologi politik, konflik kekuasaan dan prioritas pemerintah dan menteri serta tujuan kebijakan. James Elliot juga pada dasarnya mengemukakan tentang mengapa peranan aktor-aktor baik yang sektor publik maupun swasta penting bagi pengelolaan sektor pariwisata suatu negara. Dalam bukunya, Elliot menjelaskan bagaimana pentingnya pemerintah suatu negara dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pemerintah adalah salah satu aktor penting dalam sektor pariwisata pariwisata di dunia modern. Hal ini padanya dasarnya didasari pemikiran bahwa pemerintah lah yang memiliki kekuatan untuk memberikan stabilitas politik, keamanan dan kerangka hukum, serta keuangan yang diperlukanoleh sektor pariwisata.[[28]](#footnote-29)

 *Public Sector Management* (PSM) merupakan sebuah konsep yang dijabarkan oleh James Elliot dalam bukunya, “Tourism: Politics and Public Sector Management”. Secara garis besar, konsep ini menjelaskan tentang proses pengelolaan sektor pariwisata dan kaitannya dengan politik. Dalam menjelaskan tentang korelasi pengelolaan sektor pariwisata dan politik, terdapat beberapa kerangka analisis yang harus diperhatikan, yaitu tentang siapa aktor yang aktif dalam pengelolaan pariwisata sebuah negara, bagaimana sektor pariwisata itu kemudian dikelola, serta apa hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengelolaan sektor pariwisata tersebut[[29]](#footnote-30) Teori ini kemudian digunakan oleh penulis dalam menganalisa bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengelola pariwisatanya melalui Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Adapun konsep kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan aktifitas-aktifitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijaakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan,arahan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non pemerintah. Semua pemerintah nasional dengan fakta keberadaan internasionalnya yang terpisah, diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang diarahkan pada pemerintah luar negeri dan aktor-aktor internasional lainnya.[[30]](#footnote-31)

 Berkaca pada kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya serta melihat keberhasilan dari negara-negara pesaing wisata seperti Malaysia, Singapura, maupun Thailand dalam sektor pariwisata, di tahun 2015 Indonesia mengeluarkan sejumlah paket kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan disektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Salah satu paket kebijakannya adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kebijakan Bebas Visa merupakan salah satu caratermudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat meningkatkan devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata.

 Dan indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek baik pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangan wisatawan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.[[31]](#footnote-32)Penggunaan visa ini tidak terlepas hubungannya dengan hubungan internasional maupun diplomasi antar negara yang melahirkan kebijakan-kebijakan mengenai visa yang di kenal dalam lingkup Internasional.Didalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 pemerintah telah menetapkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga 20 juta orang pada tahun 2019.[[32]](#footnote-33)

Adapun definisi Wisatawan yaitu :

Liga Bangsa-bangsa. Secara umum disepakati bahwa definisi bagi wisatawan tidak memuaskan. Menurut Liga Bangsa Bangsa pada tahun 1937, seorang wisatawan asing adalah :

**“ Wisatawan asing adalah Setiap orang yang mengunjungi sebuah negara,selain dari negara yang biasa dia tinggali untuk kurun waktu paling tidak 24 jam”[[33]](#footnote-34)**

 Melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ini pemerintah Indonesia berharap dapat mendorong banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Diharapkan dengan demikian persoalan defisit neraca transaksi yang membuat melemahnya nilai tukar rupiah dapat diatasi.Dan juga kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang penting, tidak hanya untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah saja, melainkan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini masih menjadi sumber pemasukan devisa negara.

Jadi asumsi dari peneliti dengan melihat dan memetakan masalah penelitian yang kemudian dikorelasikan dengan kerangka teoritis diatas bahwa:

1. Indonesia merupakan negara yang sektor pariwisatanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
2. Tujuan dibentuknya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yaitu meningkatkan pendapatan devisa, penyedia lapangan kerja dan pendapatan masyarakat dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ke negara-negara yang memiliki potensi minat wisata yang tinggi,Memiliki dampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Barat dinilai pada analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Era kepemimpinan Joko Widodo.
4. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia memiliki dampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara yaitu dampak positif dan negatif khusunya di Jawa Barat.
5. **Hipotesis**

**“Dengan diimpelmentasikan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia memiliki dampak positif terhadap kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat ”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Sebagaimana telah disebutkan dalam usulan penelitian dan juga dalam hipotesis maka untuk lebih lanjut akan dikemukakan tabel operasional variabel dan indicator.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat ke negara-negara yang memiliki potensi minat wisata yang tinggi, | 1. Kebijakan Bebas Visa merupakan promosi pariwisata yang efektif
2. Kebijakan Bebas Visa Masing-Masing Presiden dan Penambahan Fasilitas Bebas Visa ke 74 Negara Pada Era Joko Widodo
 | 1. Keberhasilan negara negara besar menerapkan kebijakan bebas visa

(<http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>1. “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presdin Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat” dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29424/node/lt5118d82c3a2c7/perpres-no-16-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-keputusan-presiden-nomor-18-tahun-2003-tentang-bebas-visa-kunjungan-singkat>, diakses 20 Januari 2017.
2. Perpres No. 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015. Dan tahap II diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 dengan ditandatangani Perpres No. 104 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden tahap I, yaitu jumlah negara penerima fasilitas BVKS meningkat menjadi 75 negara.
 |
| **Variabel Terikat:**Memiliki dampak positif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. | 1. Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia ke Jawa Barat
2. Dampak kebijakan bebas visa kunjungan singkat Indonesia terhadap kunjungan wisatawan manca negara ke jawa barat.
 | * 1. Tenaga kerja Asing Ilegal <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/21138/2017/02/02/Jabar-Deportasi-267-Tenaga-Kerja-Asing-Ilegal>
	2. Dampak terhadap kesehatan (Penyebaran Virus dan Penyakit menular) <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/19002/2016/09/06/Jabar-Makin-Waspada-Virus-Zika-Ini-Antisipasinya>
	3. Kejahatan dan Jaringan narkoba <http://www.jabarsatu.com/2016/06/27/data-terkini-pengguna-narkoba-di-jabar-tembus-850-ribu-jiwa/> diakses tanggal 17 maret 2017

2. Bebas Visa tingkatkan pertumbuhan Wisman <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/applications/frontend/index.php?mod=news&act=showdetail&id=1861>2.2. Peningkatan Penyerapan Tenaga kerja dan Usaha sektor Pariwisata(sumber:disbudpar Jabar)2.3.Peningkatan pendapatan Masyarakat daerah destinasi wisata (Sumber : Sampling Purposive)2.4 Peningkatan Tingkat penghunian Hotel dan Akomodasi(Badan Pusat Statistik Jawa Barat:Laporan TPA (Tingkat Penghunian Hotel dan Akomodasi 2016) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**
2. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
3. **Tingkat Analisis**

Penggunaan Tingkat analisis disini adalah:

Analisa induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Dimana Kebijakan BVKS merupakan tingkat analisa sebuah kebijakan luar negri Indonesia yang dibuat untuk menaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia,jumlah kunjungan wisatawan mancanegara jadikan sebagai unit-unit analisis.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

*Metode Deskriptif*, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut untuk mencari solusi dalam kaitan-kaitannya dengan strategi baru.[[34]](#footnote-35) Dengan metode deskriptif ini, peneliti ingin mencari tahu bagaimana pengaruh yang dihasilkan bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia khususnya ke provinsi Jawa Barat dengan dicetusnya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.[[35]](#footnote-36)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan meneliti langsung kelapangan. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun dari website/internet yang membahas dampak dari kebijakan bebas visa*.*

*Purposive sampling,* Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.[[36]](#footnote-37)

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi lembaga-lembaga yang peneliti tuju untuk penelitian ini adalah:

* 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Alamat: Jl. Banceuy, No. 5, Kota Bandung

Telepon: (022) 4212834

* 1. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia:

Alamat: Kantor Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta Pusat 10110.

* 1. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan:

Alamat: Jl. Ciembuleuit No. 94, Hegamah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Telepon: (022) 2032655

* 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung

* 1. DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

* 1. Rumah Penulis Jl. Pasir Luhur gang. Arum no 392 Kabupaten Bandung
1. **Lama Penelitian**

Penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan desember 2016, yang merupakan tahap awal dari pengumpulan data, dan selesai bulan April 2017.

1. **Sistematika Penulisan**

Usulan Proposal ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I:** Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka teoritis, Hipotesis, dan skema teoritis Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi uraian awal dibuatnya dan tujuanKebijakan Bebas Visa Kunjungan singkat Indonesia.

**BAB III** Berisi uraian tentang bagaimana Potensi Wisata Jawa Barat serta dampak yang diberikan dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia ke Jawa Barat.

**BAB IV** Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. Rio Alfaj, “*Hubungan Internasional Sebagai Bidang Ilmu Interdisipliner*”, dalam <http://www.rioalfaj.com/2015/09/hubungan-internasional-sebagai-bidang.html>, di akses 1 januari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Restra*) dalam [http://www.edukasinesia.com/2016/06/69-pengertian-atau-definisi-hubungan- internasional-menurut-para-ahli.html](http://www.edukasinesia.com/2016/06/69-pengertian-atau-definisi-hubungan-%09internasional-menurut-para-ahli.html), diakses 10 januari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Citra Hennida*, Rezim dan Organisasi Internasional* (Bandung : Intrans Publishing, 2015) hlm 7 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009) hlm 187 [↑](#footnote-ref-5)
5. Robert chirtie mill,*“TOURISM International Business”*(Jakarta: Fajar Interpratama, 2000) hlm 151 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009) hlm 3 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-8)
8. Maria Imelda Ayudihta Loda : *Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia di Asia Tenggara* , Skripsi Hubungan Internasional Universitas Pasundan 2016 ,skripsi tidak diterbitkan [↑](#footnote-ref-9)
9. Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009) hlm 158 [↑](#footnote-ref-10)
10. Nenden Sekar Arum, “Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata”, *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, diakses 23 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-11)
11. *“Komisi 1 RI bentuk Panja Bebas Visa”* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/15303361/komisi.i.bentuk.panja.bebas.visa> diakses tanggal 15 maret 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. *“Deddy Mizwar mendorong evaluasi Kebijakan Bebas Visa”* dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/06/ojd6g2384-wagub-jabar-dorong-evaluasi-kebijakan-bebas-visa> diakses tanggal 21 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-13)
13. *“Industri pariwisata” dalam www.depbudpar.com/diakses pada tanggal 23 Desember 2016.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Maria Imelda Ayudihta Loda : *Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia di Asia Tenggara* , Skripsi Hubungan Internasional Universitas Pasundan 2016 ,skripsi tidak diterbitkan [↑](#footnote-ref-15)
15. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-16)
16. Robert Jackson dan Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 175. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid., hlm. 176. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid., hlm. 184. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zainuddin Djafar dan Robby Aulia Fadila., *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2013), hlm.129. [↑](#footnote-ref-20)
20. Jack C Plano and Roy Olton, Internasional Relation Dictionary, Holt and Winston, (New York, 1969), hal 89 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. hlm 9 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibid.hlm 9 [↑](#footnote-ref-23)
23. “*Pariwisata Internasional”* dalam <https://caretourism.wordpress.com/2013/02/22/wisata-nusantara-dan-wisata-nasional/> diakes tanggal 16 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-24)
24. ibid [↑](#footnote-ref-25)
25. “*Rencana Strategis 2012-2014, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia*” dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/RENSTRA_FINAL_all_29juni2012.pdf>, diakses 2 januari 2016. [↑](#footnote-ref-26)
26. Oka A. Yoeti , “Pemasaran Pariwisata Tourism Marketing”, Bandung Angkasa1990 hlm 14 [↑](#footnote-ref-27)
27. James Elliot, *Tourism: Politics and Public Sector Management*, Routledge, London, 1997, hal. 10. [↑](#footnote-ref-28)
28. James Elliot, *Tourism: Politics and Public Sector Management*, Routledge, London, 1997, hal. 2. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
30. Robert Jackson dan Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 439. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
32. “*Empa*t *Kebijakan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Pariwisata*”, dalam <http://beritadaerah.co.id/2015/04/22/empat-kebijakan-pemerintah-dorong-pertumbuhan-pariwisata/> diakses 2 januari 2016. [↑](#footnote-ref-33)
33. Robert chirtie mill,*“TOURISM International Business”*(Jakarta: Fajar Interpratama, 2000) 21 [↑](#footnote-ref-34)
34. Maria Imelda Ayudihta Loda :Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia di Asia Tenggara , Skripsi Hubungan Internasional Universitas Pasundan 2016 , skripsi tidak diterbitkan [↑](#footnote-ref-35)
35. [↑](#footnote-ref-36)
36. “*Purposive sampling*” dalam http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-teknik-purposive-sampling-menurut-para-ahli/ diakses tanggal 16 maret 2017 [↑](#footnote-ref-37)